

LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM
PENGUNAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN
PELAPORAN KORUPSI
DI NAGARI KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI
DURIAN (KKS), KECAMATAN PATAMUAN,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh:

Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA

Dr. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM

Drs. Yoserizal, M.Si

Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA

(KETUA)

(ANGGOTA)

(ANGGOTA)

(ANGGOTA)

DIBIYAI OLEH DANA DIPA FISIP UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penggunaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Pelaporan Korupsi di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian (KKS), Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman

Ketua Tim Pengusul

Nama : Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA
NIP : 19850918 201504 1 001
Jabatan/Golongan : Penata Muda TK I III/b
Jurusan/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/ FISIP
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : Kampus Unand Limau Manih Padang 25163

Anggota Tim Pengusul

Jumlah Anggota : 3 orang,
Nama Anggota I : Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE., MM
Nama Anggota II : Drs. Yoserizal, M.Si
Nama Anggota III : Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA

Lokasi Kegiatan/Mitra

Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian
Kabupaten/Kota : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

Luaran yang dihasilkan

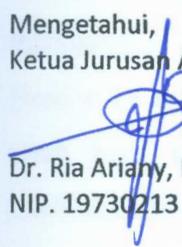
: Memperkenalkan mekanisme pengaduan pelayanan publik dan pelaporan korupsi serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Jangka waktu Pelaksanaan : 2 Bulan

Biaya Total : Rp. 3.573.000,-

Padang, 7 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik

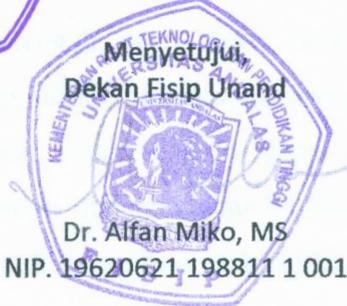

Dr. Ria Ariany, M.Si
NIP. 19730213 200812 2 001

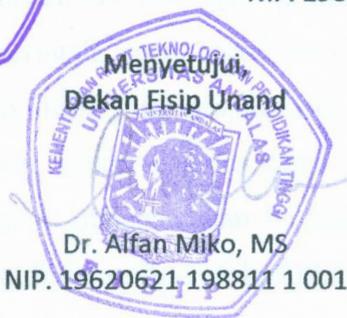


Ketua Tim Pengusul,


Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA
NIP. 19850918 201504 1 001

Menyetujui,
Dekan Fisip Unand


Dr. Alfian Miko, MS
NIP. 19620621 198811 1 001



**KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAPORAN KORUPSI
DI NAGARI KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN
(KKS), KECAMATAN PATAMUAN, KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah seakan jalan ditempat mengingat masih terjadinya korupsi diberbagai insitusi pemerintah itu sendiri. Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi tahun 2017 yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia, terdapat tiga institusi yang paling terdampak dari korupsi yakni legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), peradilan, dan kepolisian. Survei ini menandakan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Dengan demikian, perlu kiranya untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini mengingat posisi masyarakat sebagai *stakeholder* yang sangat dekat dengan pelaksanaan pembagunan sekaligus juga sebagai penerima manfaat atas pemberian pelayanan yang diberikan.

Fakta yang ada menunjukkan pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan sampai ketinggian terendah. Sebagai contoh, pemerintah pusat telah meyediakan sarana pengaduan pelayanan atau yang lebih dikenal dengan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (lapor) yang digulir sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah telah pula banyak membuat regulasi yang memerintahkan setiap instansi pemerintahan untuk mendorong transparansi informasi publik. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu, pemerintah telah juga membangun institusi pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yakni Ombudsman sejak tahun 2000. Disatu sisi berbagai upaya pemerintah tadi patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan aparaturnya. Akan tetapi disisi yang lain, antusiasme masyarakat untuk melakukan pengawasan masih dapat dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi dikalangan masyarakat sendiri untuk menggunakan berbagai mekanisme tersebut. Padahal keberadaan berbagai mekanisme tadi hanya bisa efektif jika diiringi peran serta publik dalam melakukan pengawasan,

Oleh karena itu diperlukan kolaborasi nyata antara komunitas yang ada dimasyarakat

dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat ditingkat terendah atas hak-hak pelayanan serta mekanisme pengaduan dan menyampaikan informasi jika menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul. Untuk itu, sebagai rangkaian kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian (KKS), Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman maka diperlukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat/ komunitas dalam menggunakan sarana pengaduan dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun alasan dipilihnya Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian (KKS), Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat lintas komunitas seperti komunitas agama dengan menghidupkan kembali gerakan kembali ke surau (<http://www.pelitasumbar.com/2018/01/wabup-suhatri-bur-apresiasi-nagari.html>) dan komunitas pemuda dengan melakukan kesenian tradisional (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/46402/posko-pemuda-koto-mambang-terbaik>). Dengan hidupnya kegiatan berbagai komunitas masyarakat yang ada di Nagari ini, merupakan modal dasar yang sangat baik untuk melakukan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan pengaduan pelayanan publik dan pelaporan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PERMASALAHAN

Diskursus mengenai konsep penguatan masyarakat berangkat dari kritik terhadap dominasi pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Kondisi yang terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia menunjukkan pola penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat *top down* dan cenderung memobilisasi masyarakat. Merefleksikan pada kegagalan pemerintah mengontrol korupsi, maka penting kiranya memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Apalagi hal tersebut sangat dimungkinkan dengan kondisi negara yang sangat demokratis dimana masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya sebebaskan mungkin.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah peran serta masyarakat untuk menggunakan sarana pengaduan pelayanan publik dan pelaporan dugaan korupsi masih dapat dikatakan minim. Adanya kecenderungan kultur permisif ketika berhadapan dengan penyelenggara pemerintah (lihat: Schulte Nordholt & Klinken, 2007; Tidey, 2012) membuat perlu terobosan yang lebih nyata untuk mendorong masyarakat lebih berdaya. Disinilah pentingnya untuk memberikan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas pada level pemerintah terendah yakni nagari. Dengan memperkuat komunitas yang dilatih maka diharapkan tumbuh rasa kritis ditengah masyarakat. Disamping itu, komunitas tadi diharapkan juga menginspirasi anggota disetiap basis komunitasnya agar bersama pemerintah turut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENGABDIAN

Menghentikan perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan rencana aksi pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai representasi partisipasi publik. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat dapat menjadi tanda komitmen pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilakukan mulai dari tingkat pemerintahan terendah yakni nagari. Berangkat dari hal tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pola perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Identifikasi perilaku koruptif sebagai *behavior problem* tentu membutuhkan sensitifitas yang baik dari publik. Kultur permisif dan acuh terhadap persoalan korupsi yang banyak ditemukan ditengah masyarakat membuat pemahaman korupsi sebagai suatu perilaku normal keseharian yang mudah ditemui masyarakat. Oleh karena itu, maka pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi titik-titik yang rentan terhadap korupsi pada sektor pelayanan publik melalui uraian permasalahan dari para peserta atas apa yang pernah mereka alami ketika berhadapan dengan birokrasi. Peserta juga akan mendapatkan simulasi terhadap persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar memiliki pemahaman dasar tentang korupsi, pungli, gratifikasi, suap dan sejenisnya.

2. Pembuatan model

Pembuatan model dapat menggambarkan prioritas agenda anti-korupsi yang bisa dilakukan masyarakat bersama pemerintah. Pembuatan model ini tentu didasari atas pemaparan peserta pada tahapan sebelumnya. Berangkat dari pemaparan tersebut maka, fasilitator akan memperkenalkan berbagai institusi yang selama ini mengawal pemerintah baik dari internal (seperti inspektorat) dan eksternal (seperti DPRD dan ombudsman). Pengenalan berbagai lembaga tadi difokuskan pada peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut serta mekanisme kerja termasuk bagaimana menggunakan layanan pengaduan pada instansi tersebut. Disamping itu, fasilitator juga akan memperkenalkan berbagai aplikasi

elektronik untuk pengaduan mal administrasi dan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti lapor dan jaga.

Adapun khalayak sasaran strategis yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan tentu lebih memprioritaskan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Adapun unsur-unsur yang akan dilibatkan adalah:

1. Pemerintah Kecamatan.
2. Pemerintah Nagari
3. Badan Perwakilan Nagari
4. Perwakilan kelompok-kelompok masyarakat di nagari